

PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA DAN KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN BANGUN PURBA

Aulia Fitri¹, Mas'ut², Jalilah Ilmiha³

^{1,2,3}Universitas Islam Sumatera Utara

Email: aulyafitriiii@gmail.com¹, masut@fe.uisu.ac.id², jalilah.ilmiha@fe.uisu.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangun Purba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 72 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan dari 24 desa. teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh data yang diolah menggunakan program SPSS 22. hasil penelitian ini menemukan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa., sedangkan Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.

Kata Kunci: Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Desa dan Kinerja pengelolaan Keuangan.

ABSTRACT

This study aims to determine the Influence of the Village Financial System and Village Apparatus Competence on the Performance of Village Government Financial Management in Bangun Purba District. The method used in this study is quantitative. The population in this study was 72 respondents consisting of village heads, village secretaries, and financial heads from 24 villages. The sampling technique used was a saturated data sample processed using the SPSS 22 program. The results of this study found that the Village Financial System had an effect on Village Financial Management Performance, Village Apparatus Competence did not have an effect on Village Government Financial Management Performance, while the Village Financial System and Village Apparatus Competence simultaneously had an effect on Village Government Financial Management Performance.

Keywords: Village Financial System, Village Apparatus Competence and Financial Management Performance

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum dengan batas area dan wewenang untuk mengelola

serta melaksanakan urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat menurut inisiatif masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 17 kewajiban desa.

Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur Kinerja pemerintah desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan desa. Kinerja pemerintah desa yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan desa, dan pelayanan sosial masyarakat.

Salah satu masalah kinerja pengelolaan keuangan pemerintah desa yang sering muncul adalah rendahnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Beberapa desa yang mengalami kesulitan dalam merencanakan dan mengalokasikan dana secara optimal, sehingga anggaran yang tersedia tidak digunakan secara maksimal. seperti proyek pembangunan infrastruktur di beberapa desa yang belum terealisasi salah satunya di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba, seharusnya selesai dalam waktu tertentu seringkali terhambat karena perencanaan yang kurang matang, yang mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya. Hal ini tidak hanya mengganggu pelaksanaan proyek, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, efektivitas penggunaan dana desa juga menjadi perhatian utama. Permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan efektif telah menjadi sorotan publik. Kasus penyelewengan dan korupsi dana desa juga telah banyak mencuat di media massa. kenyataan yang terjadi adalah kasus korupsi dana desa dan dugaan penyelewengan dana desa di desa begerpang kecamatan bangun purba pada tahun 2017-2023 dengan total kerugian Rp. 601.048.841 menunjukkan minimnya komitmen terkait pengelolaan dana desa. Kepala desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa diharapkan lebih kompeten dan akuntabel dalam mengelola dana desa. Lemahnya pengelolaan dana desa ini tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi oleh hasil kajian sejumlah kajian evaluasi sejumlah institusi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). jumlah dana yang diturunkan dari pemerintah pusat cukup besar, hal tersebut mengakibatkan rawan terjadinya penyelewengan anggaran dari kepentingan pribadi aparatur desa (Husna & Abdullah, 2016). Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan.

Lebih penting lagi adalah tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola dana desa yang mereka miliki. (Munti, 2017).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa”. Untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). (Ilham & Lusiani, 2022)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau yang dapat disingkat SisKeuDes adalah sebuah aplikasi yang memiliki fungsi untuk dapat digunakan oleh desa, dimana pengembangan dari aplikasi tersebut yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Siskeudes sangat membantu karena sistem keuangan jauh lebih *complicated* (rumit) dibanding sistem keuangan perusahaan multinasional (Sandjojo, 2021). Aplikasi SisKeuDes akan mempercepat dan mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal pencairan dana desa untuk periode selanjutnya yang dapat dicairkan secara tepat waktu. (Kusuma & Ardhiarisca, 2022).

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan secara acak di 24 Desa di Kecamatan Bangun Purba, Faktor Pertama Yang didapat bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bangun Purba telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan semua desa telah menerapkan SisKeuDes. Namun pada praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi oleh aparat desa sehingga terkadang harus meminta bantuan dari pihak ketiga. Kendala yang ada pada umumnya berhubungan dengan kurangnya pemahaman aparat tentang pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aplikasi Siskeudes apalagi dengan kebijakan yang berubah-ubah dan versi aplikasi yang terus diperbaharui.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pemerintah desa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi aparatur pemerintah desa. Menurut (Irafah et al., 2020), kompetensi merupakan gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki aparatur yang secara langsung mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Indikator kompetensi aparatur pemerintah desa meliputi pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Fenomena yang terjadi adalah sebagian perangkat desa terlambat dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan mengeluhkan sulitnya penyusunan laporan tersebut. Laporan Pertanggung Jawaban keuangan desa (LPJ) merupakan dokumen yang tebal dan rumit karena banyaknya lampiran yang harus disertakan, sehingga memerlukan ketelitian dan kompetensi dari perangkat desa dalam menyusunnya.

Berdasarkan beberapa fenomena permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu: **“Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba”**.

B. KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori *Agency* menjelaskan bahwa terdapat hubungan berdasarkan suatu perjanjian antara para pihak yang berkepentingan dalam organisasi antara (*agent*) yaitu Pengelola Dana Desa dengan (*principal*) yaitu masyarakat. Hubungan teori agensi dengan Kinerja Pemerintah Desa yaitu *principals* memberikan kepercayaan kepada *agent* untuk mengelola Dana Desa. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat & *agent* adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala daerah & aparat daerah lainnya. Dalam mengelola Dana Desa, kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, & mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak & kewenangan meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam Pengelolaan Dana Desa, organisasi berkewajiban untuk menjelaskan & mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemberi amanah (Budiarto, 2020)

Sistem Keuangan Desa

Menurut (Rivan & Maksum, 2019) Sistem keuangan desa merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Selain berbasis *online*, sistem keuangan desa juga disiapkan secara *offline* atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda. Pemerintah desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

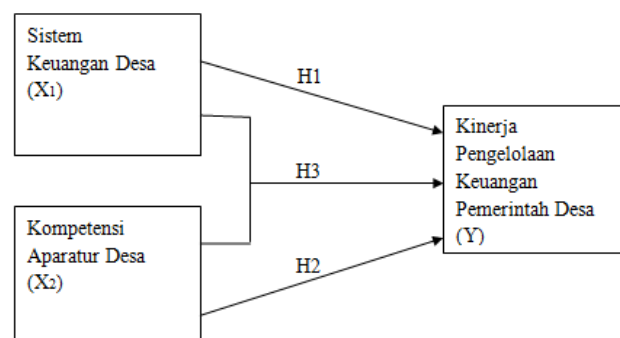
Kompetensi Aparatur Desa

Pengertian dan arti kompetensi oleh Spencer dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu (Moeheriono, 2014:4). Kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang yang dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan. Aparatur yang kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa

Kinerja pengelolaan pemerintah desa adalah kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Kinerja ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemerintahan desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya desa.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

H₁ = Sistem Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba

H₂ = Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba.

H₃ = Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dengan mengambil lokasi penelitian di 24 desa. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Seketaris Desa, dan Kaur Keuangan yang tersebar di 24 Desa di Kecamatan Bangun Purba dengan total 72 responden. Menurut Sugiyono (2019) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 72 orang. Teknik pengumpulan data melalui survey, wawancara, dan kuisioner.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas Data

Tabel 1
Hasil Pengujian Validitas Variabel Sistem Keuangan Desa

Nomor Pernyataan Pada Kuisioner	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X _{1.1}	0,413	0,231	Valid
X _{1.2}	0,513	0,231	Valid
X _{1.3}	0,378	0,231	Valid
X _{1.4}	0,406	0,231	Valid
X _{1.5}	0,547	0,231	Valid
X _{1.6}	0,361	0,231	Valid
X _{1.7}	0,370	0,231	Valid
X _{1.8}	0,168	0,231	Valid
X _{1.9}	0,408	0,231	Valid
X _{1.10}	0,369	0,231	Valid
X _{1.11}	0,357	0,231	Valid
X _{1.12}	0,408	0,231	Valid
X _{1.13}	0,411	0,231	Valid
X _{1.14}	0,321	0,231	Valid
X _{1.15}	0,397	0,231	Valid
X _{1.16}	0,395	0,231	Valid

Sumber: SPSS 22 diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa item pernyataan untuk variabel sistem keuangan desa terdiri dari 16 pernyataan kemudian diujikan validitasnya kepada 72 orang responden, dan semua pernyataan untuk variabel dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi (r_{hitung}) lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,231 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan untuk variabel sistem keuangan desa adalah valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Tabel 2
Hasil Pengujian Validitas Variabel Kompetensi Aparatur Desa

Nomor Pernyataan Pada Kuisioner	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X _{2.1}	0,399	0,231	Valid
X _{2.2}	0,356	0,231	Valid
X _{2.3}	0,348	0,231	Valid
X _{2.4}	0,395	0,231	Valid
X _{2.5}	0,370	0,231	Valid
X _{2.6}	0,348	0,231	Valid
X _{2.7}	0,515	0,231	Valid
X _{2.8}	0,490	0,231	Valid
X _{2.9}	0,439	0,231	Valid
X _{2.10}	0,437	0,231	Valid
X _{2.11}	0,420	0,231	Valid
X _{2.12}	0,543	0,231	Valid
X _{2.13}	0,321	0,231	Valid
X _{2.14}	0,318	0,231	Valid
X _{2.15}	0,323	0,231	Valid
X _{2.16}	0,360	0,231	Valid
X _{2.17}	0,353	0,231	Valid
X _{2.18}	0,414	0,231	Valid
X _{2.19}	0,336	0,231	Valid
X _{2.20}	0,306	0,231	Valid

Sumber: SPSS 22 diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa item pernyataan untuk variabel Kompetensi Aparatur Desa terdiri dari 20 pernyataan kemudian diujikan validitasnya kepada 72 orang responden, dan semua pernyataan untuk variabel dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi (r_{hitung}) lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,231 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan untuk variabel Kompetensi Aparatur Desa adalah valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Tabel 3**Hasil Pengujian Validitas Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa**

Nomor Pernyataan Pada Kuisioner	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Y.1	0,276	0,231	Valid
Y.2	0,350	0,231	Valid
Y.3	0,588	0,231	Valid
Y.4	0,459	0,231	Valid
Y.5	0,591	0,231	Valid
Y.6	0,531	0,231	Valid
Y.7	0,439	0,231	Valid
Y.8	0,444	0,231	Valid
Y.9	0,613	0,231	Valid
Y.10	0,551	0,231	Valid
Y.11	0,507	0,231	Valid

Sumber: SPSS 22 diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa item pernyataan untuk variabel kinerja pengelolaan keuangan pemerintah desa terdiri dari 11 pernyataan kemudian diujikan validitasnya kepada 72 orang responden, dan semua pernyataan untuk variabel dalam penelitian ini memiliki nilai korelasi (r_{hitung}) lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,231 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan untuk variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa adalah valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

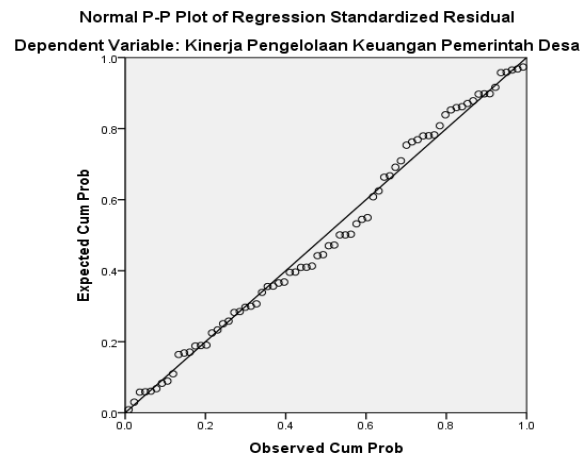
Uji Reliabilitas**Tabel 4****Hasil Pengujian Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
X ₁	0,641	Reliabel
X ₂	0,703	Reliabel
Y	0,686	Reliabel

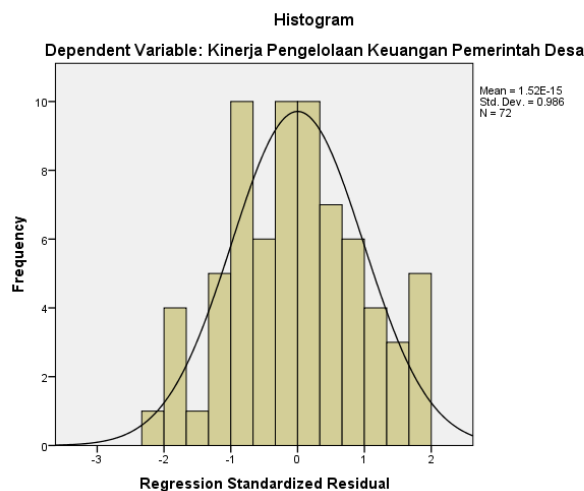
Sumber: SPSS 22 diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan koefisien *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel pada tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa kuesioner yang digunakan sudah reliabel, karena masing-masing variabel memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$.

Uji Asumsi Klasik**A. Uji Normalitas Data**

**Gambar 2****Hasil Uji Normalitas *p-p plot***

Berdasarkan gambar 5.1 diatas diketahui bahwa sebaran data berada disekitaran garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi Normalitas.

**Gambar 3****Hasil Uji Normalitas Kurva Histogram**

Dari hasil tampilan kurva histogram diatas dapat terlihat bahwa kurva berbentuk lonceng, hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.56510067
Most Extreme Differences		.067

	Positive.	.067
	Negative.	-.062
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Gambar 4
Hasil Uji Normalitas *one-sample kolmogorov-smirnov test*

Berdasarkan gambar 5.1 diatas diketahui bahwa sebaran data berada disekitaran garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi Normalitas. Berdasarkan gambar 5.2 menunjukkan hasil *one-sample kolmogorov-smirnov test* diketahui bahwa sig (nilai *asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0.200 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa instrument atau kuisioner untuk main test dari variabel Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Desa dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa nilai residualnya terdistribusi dengan normal.

B. Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas bertujuan untuk melihat apakah model regresi ditentukan ada atau tidaknya koreksi antar variable bebas. Untuk mengetahuinya ada atau tidaknya multikolineritas dilihat dari perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan tolerance dari masing-masing variable bebas. Apabila nilai tolerance > 0,10 serta VIF < 10,00 maka dinyatakan tidak terjadi Multikolineritas.

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	19.239	8.947		2.150	.035		
Sistem Keuangan Desa	.305	.082	.406	3.726	.000	.998	1.002
Kompetensi Aparatur Desa	.099	.073	.148	1.356	.179	.998	1.002

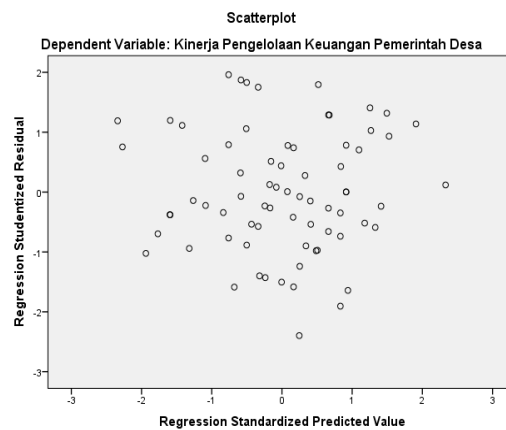
a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa

Gambar 5
Hasil Uji Multikolineritas

Berdasarkan gambar 5.3 diatas diketahui bahwa nilai tolerance untuk variabel Sistem Keuangan Desa sebesar 0,998 dan variabel Kompetensi Aparatur Desa 0,998. Dapat disimpulkan nilai tolerance dari variabel Sistem Keuangan Desa dan kompetensi aparatur desa > 0,10.

Untuk nilai VIF variabel Sistem Keuangan Desa 1,002 dan variabel Kompetensi Aparatur Desa 1,002 sehingga nilai VIF dari variabel Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa < 10.00 . kesimpulan dari data tersebut yaitu data tersebut tidak adanya multikolinearitas antar variabel bebas

C. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot Dependent Variabel Y

Dari gambar 5.4 diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. disimpulkan bahwa pola model regresi tidak terjadi masalah *heteroskedastisitas*, sehingga model regresi layak dipakai untuk menganalisis pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemeintah Desa.

Hasil Uji Hipotesis

A. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	19.239	8.947		2.150
	Sistem Keuangan Desa	.305	.082	.406	3.726
	Kompetensi Aparatur Desa	.099	.073	.148	1.356
					.035
					.000
					.179

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa

Gambar 7
Hasil Uji Parsial T

1. Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa

Dari perhitungan uji hipotesis t_{hitung} dan t_{tabel} pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa diperoleh nilai 3,726 > 1,994 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba.

2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa

Dari perhitungan uji hipotesis pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa diperoleh nilai 1,356 < 1,994 dan nilai signifikansi 0,179 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Keuangan Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba.

B. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	103.949	2	51.975	7.677	.001 ^b
	Residual	467.162	69	6.770		
	Total	571.111	71			

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan Desa

Gambar 8
Hasil Uji F

Berdasarkan hasil uji F pada variabel diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 7,677 dengan nilai signifikansi 0,001 ($0,001 < 0,05$). Hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,677 > 3,13$) perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa, atau kata lain H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hasil Uji Koefisien Deteminasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.427 ^a	.182	.158	2.602

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan Desa

Gambar 9
Hasil Uji koefisien Determinasi

Adapun besarnya pengaruh dari Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur Desa secara bersama-sama terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba 24 Desa sebesar 15,8 % dan selebihnya yaitu sebesar 84,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

Metode Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	19.239	8.947		2.150
	Sistem Keuangan Desa	.305	.082	.406	3.726
	Kompetensi Aparatur Desa	.099	.073	.148	1.356

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa

Gambar 10
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS V22 diperoleh persamaan regresi yaitu

$$Y = 19.239 + 0.305 (X_1) + 0.099 (X_2) + e.$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas secara parsial menunjukkan hubungan antara variabel indepent, persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut

1. Nilai konstanta sebesar 19.239 artinya apabila nilai variable independen yakni Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa dalam penelitian ini bernilai 0 maka nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa adalah bernilai sebesar 19.239
2. Koefisien regresi untuk variabel Sistem Keuangan Desa sebesar 0,305 artinya jika variabel Kompetensi Aparatur Desa ditingkatkan sebesar 1 % sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba sebesar 30,5 %
3. Koefisien regresi untuk variabel Kompetensi Aparatur Desa sebesar 0,099 artinya jika variabel Kompetensi Aparatur Desa ditingkatkan sebesar 1 % sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa sebesar 9,9 %

Pembahasan

1. **Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Dari perhitungan uji hipotesis t_{hitung} dan t_{tabel} pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa diperoleh nilai ($3,726 > 1,994$) dan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Lastiana Dkk, 2023) yang menyatakan Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa sangat signifikan. Sistem yang baik memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola anggaran secara lebih tertib dan efisien, serta meminimalisir risiko kesalahan administrasi atau penyimpangan dalam penggunaan dana. Selain itu, sistem yang transparan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya akan memperkuat akuntabilitas publik. Dengan adanya sistem yang terstandarisasi, desa dapat menyusun laporan keuangan yang lebih tepat waktu dan akurat, yang menjadi indikator penting dalam pengukuran kinerja keuangan. sehingga sistem keuangan desa sangat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan pemerintah desa.

2. Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa

Dari perhitungan uji hipotesis pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa dilihat dari $t_{hitung} < t_{tabel}$ diperoleh nilai ($1,356 < 1,994$) dan nilai signifikansi ($0,179 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Keuangan Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan studi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan bahwa Aparatur Desa memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan didalam penelitiannya. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tahir H, 2019) yang menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Secara teoritis kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seseorang

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara professional pada saat bekerja. Aparatur desa yang memiliki kompetensi, sering kali tidak diberikan ruang atau wewenang yang cukup untuk menerapkan pengetahuan. Sebagian besar keputusan mengenai pengelolaan keuangan desa sering kali lebih bergantung pada kepala desa atau pihak lain yang memiliki kekuasaan, sementara aparatur hanya berperan sebagai pelaksana.

Selain itu, rendahnya motivasi kerja juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pengaruh kompetensi terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Meskipun aparatur desa memiliki kemampuan yang memadai, tanpa adanya insentif yang jelas, penghargaan atas kinerja yang baik, atau peluang untuk pengembangan karier, mereka mungkin tidak memiliki dorongan untuk menggunakan kompetensinya secara maksimal. Sistem insentif yang tidak memadai dapat menyebabkan mereka merasa tidak dihargai, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya semangat kerja dan kualitas pelaksanaan tugas. Lebih lanjut, dalam banyak kasus, keputusan-keputusan strategis terkait pengelolaan keuangan desa sering kali tidak didasarkan pada pertimbangan teknis atau kompetensi aparatur, melainkan dipengaruhi oleh intervensi politik atau kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini menyebabkan keputusan keuangan yang diambil tidak selalu mengutamakan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

3. Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil uji F pada variabel diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 7,677 dengan nilai signifikansi 0,001 ($0,001 < 0,05$). Hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,677 > 3,13$) perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian (Kusuma & Ardhiarisca, 2022) menyatakan Kompetensi Aparatur Desa dan aplikasi Sistem Keuangan Desa secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan pada Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Sistem Keuangan Desa yang efektif dapat memfasilitasi proses Pengelolaan Keuangan Desa secara transparan, efisien, dan akuntabel, sedangkan kompetensi aparatur desa yang memadai sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu,

pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa secara simultan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa sangatlah signifikan, karena kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mendukung dalam menciptakan pengelolaan yang optimal.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil uji T disimpulkan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba.
2. Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Bangun Purba merupakan hasil dari uji hipotesis (uji T).
3. Berdasarkan hasil uji parsial F yang sudah dilakukan disimpulkan bahwa sistem keuangan desa dan kompetensi aparatur desa secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Saran

Berdasarkan pengambilan kesimpulan yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Aparatur desa di Kecamatan Bangun Purba sebagai pengelola keuangan desa sebaiknya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar sehingga akuntabilitas dapat berjalan dengan baik.
2. Aparatur desa di Kecamatan Bangun Purba yang mengelola Sistem keuangan desa sebaiknya berlatar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Bagi Penelitian selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang sama dengan penelitian ini di sebaiknya menambah variabel bebas yang diteliti misalnya variabel komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan kualitas pengawasan BPD Dan menambah variabel lain diluar variabel peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor anteseden yang mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 145-159.
- Helmi, T. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Ilham, & Lusiani, K. E. V. I. (2022). *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka*.
- Irafah, Sari, E. N., Akuntansi, P. M., Ekonomi, F., & Muhammadiyah, U. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Peran Internal Audit , dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 8(71), 337–348.
- Jogiyanto, 2014. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Edisi ke 10). Yogyakarta: BPFE.
- Kindangen, Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2022). *Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dala Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes Di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa*. 13(2), 164–178.
- Kusuma, & Ardhiarisca, O. (2022). *Analisis Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Dan Peran Aplikasi sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep)*. 2(1).
- Landapase, L. I. M. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, Dan Kecamatan Kange Kabupaten Sikka*. Skripsi Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
- Morilda, Bustami, E., & Khairi, A. (2022). *Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Interventing Di Kecamatan Hamparan Rawang*. 4(1), 1–15.
- Moehariono, 2014, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* Edisi Revisi, Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada.

- Munti. (2017). *Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa : Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh*. 18(2), 172–182.
<https://doi.org/10.18196/jai.180281>.
- Rivan, & Maksum, I. R. (2019). *Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management*. 9(2), 92–100.
- Sandjojo, E. P. (2021). *Mendes Pdtt Sebut Siskeudes Efektif Bantu Akunting Desa*. Kemendes.Go.Id.
- Sugiyono. (2019), *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi,R&D dan Penelitian Pendidikan)*, Bandung: Alfabeta CV.